

Kaitan Karakteristik Perangkat Desa Dengan Indeks Pembangunan Desa Di Indonesia

Teguh Trilaksono¹, Ni Made Sukartini²

¹Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Airlangga Surabaya/
Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur;

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Surabaya
Email corresponding author: trilaksono@bps.go.id

ABSTRAK

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Sebagai wujud untuk mencapai pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan tingkat kemajuan desa, tentunya didukung kualitas sumber daya manusia dari perangkat desa yang memadai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kaitan karakteristik perangkat desa terhadap IPD. Data yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan data mikro dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018 oleh BPS. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah regresi variabel *dummy* dengan menggunakan metode estimasi *ordinary least square* (OLS) dan pengujian spesifikasi model menggunakan *robust standard error*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perangkat desa berjenis kelamin perempuan, desa yang dipimpinnya memiliki IPD lebih tinggi dibandingkan desa yang dipimpin perangkat desa berjenis kelamin laki-laki. Sedangkan dilihat dari pendidikan perangkat desa, penelitian ini menemukan bukti bahwa perangkat desa yang lebih berpendidikan cenderung akan meningkatkan IPD.

Kata Kunci: IPD, Karakteristik Perangkat Desa, OLS, *Robust StandarError*

1. PENDAHULUAN

Desa merupakan wilayah administrasi terendah yang menjadi subyek pembangunan secara mandiri. Fokus pembangunan di desa bertujuan untuk menjadikan desa yang maju dan mandiri. Saat ini desa diberikan kesempatan mengurus tata pemerintahan sendiri dan melaksanakan pembangunan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini sejalan dengan sembilan agenda prioritas Nawa Cita pada pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, khususnya butir ketiga. Pembangunan desa merupakan konsep multidimensional yang kompleks. Tingkat perkembangan pembangunan desa perlu diukur menggunakan ukuran yang secara fungsional saling terkait. Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. IPD ini memuat informasi tentang dimensi dan indikator pembangunan desa yang dapat secara langsung merujuk pada pembangunan apa yang diperlukan di desa.

Target dalam RPJMN 2015-2019 mengamanahkan desa mandiri bertambah 2.000 desa dan desa tertinggal berkurang sebanyak 5.000 desa. Sebagai upaya untuk mewujudkannya, desa diklasifikasikan menjadi tiga kategori desa berdasar nilai IPD yaitu desa tertinggal, berkembang dan mandiri. Salah satu dari lima dimensi penyusun IPD adalah penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan di level desa di pimpin oleh seorang kepala desa. Kepala desa memiliki tugas melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat di desa. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa adalah kepala desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sebagai wujud untuk mencapai pelaksanaan tata pemerintahan yang baik dan kemajuan desa, tentunya didukung kualitas sumber daya manusia dari kepala desa dan perangkatnya yang memadai.

Odoardi dan Muratore (2019) menjelaskan bahwa kualitas sumber daya manusia yang memiliki pendidikan lebih tinggi mampu memulihkan perekonomian dibandingkan dengan wilayah keunggulan sumber daya alam melalui peningkatan produktivitas. Penelitian lainnya

tentang pendidikan pernah dilakukan dengan menggunakan data tentang pendidikan pemimpin nasional dalam basis data lintas negara dan transisi acak. Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa pemimpin yang lebih berpendidikan cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi asing dan pencapaian pendidikan warga negara (Besley dkk., 2011; Diaz-Serrano dan Pérez-Reynosa, 2013; Congleton dan Zhang, 2013). Carnes dan Lupu (2016) juga menyelidiki dampak pendidikan para pemimpin politik di tingkat nasional, negara bagian dan tingkat lokal dalam konteks yang berbeda. Mereka yang mempelajari efek variasi kelembagaan pada kualitas pemimpin lokal. Penelitian sebelumnya, secara umum hanya dilakukan pada studi kasus di sebagian kecil wilayah tertentu saja. Penulis termotivasi melakukan penelitian ini dikarenakan ketersediaan data pada level desa dan belum ada penelitian yang melakukan sampai level desa di seluruh wilayah Indonesia. Penelitian ini akan mengkaji tentang kaitan karakteristik perangkat desa terhadap IPD pada level pemerintahan desa di seluruh wilayah Indonesia.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, desentralisasi merupakan bentuk penyerahan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Di Indonesia, desentralisasi mulai diterapkan sejak memasuki era reformasi, dengan menerbitkan UU No.22 tahun 1999 tentang pemerintah daerah dan UU No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah dan sekaligus menjadi awal era baru desentralisasi fiskal di Indonesia yang mulai efektif dilaksanakan sejak 1 Januari 2001. Goel, dkk (2017) menyatakan bahwa efek dari desentralisasi dianggap kurang menguntungkan bagi perusahaan besar, namun pada dimensi fiskal dan administrasi prinsip desentralisasi mampu meningkatkan persepsi kinerja pemerintahan. Goel, dkk (2017) dalam penelitian yang berbeda juga mengatakan bahwa desentralisasi meningkatkan kualitas kelembagaan.

Indeks Pembangunan Desa (IPD) merupakan suatu ukuran yang disusun untuk menilai tingkat kemajuan atau perkembangan desa di Indonesia. Unit analisis IPD adalah "Desa". Pengukuran IPD dibangun dari dua sumber data yaitu data hasil Potensi Desa (Podes) dan data wilayah administrasi pemerintah menurut Permendagri RI Nomor 39 Tahun 2015 terkait jumlah desa terintegrasi di Indonesia. IPD disusun dari 5 dimensi, 12 variabel dan 42 indikator penyusunnya. Dimensi penyusunnya yaitu Pelayanan Dasar, Kondisi Infrastruktur, Aksesibilitas atau transportasi, pelayanan umum dan penyelenggaraan pemerintahan. Penyusunan IPD digunakan untuk menunjukkan tingkat perkembangan pembangunan di suatu desa. Nilai dari indeks mempunyai rentang 0 s/d 100. Pengelompokan kategori desa dibagi menjadi tiga kategori untuk memudahkan interpretasi, yaitu desa mandiri dengan nilai IPD > 75, desa berkembang dengan nilai IPD >50 s.d ≤ 75 dan desa tertinggal dengan nilai IPD ≤ 50. Penghitungan IPD setiap desa diformulasikan sebagai berikut (BPS, 2019) :

$$IPD = (b1*V1+b2*V2+b3*V3+.....+b42*V42)*20.....(1)$$

Keterangan :

IPD : Nilai IPD setiap desa (bernilai 0 – 100)

V1 : Skor indikator ke-1

V2 : Skor indikator ke -2

V3 : Skor indikator ke -3

V42 : Skor indikator ke -42

b1 : Penimbang/pembobot indikator ke-1

b2 : Penimbang/pembobot indikator ke-2

b3 : Penimbang/pembobot indikator ke-3

b42 : Penimbang/pembobot indikator ke-42

Odoardi dan Muratore (2019) menjelaskan pada penelitiannya di Italia bahwa kualitas sumber daya manusia yang memiliki pendidikan lebih tinggi akan mampu memulihkan perekonomian dengan lebih baik melalui peningkatan produktivitas dibandingkan dengan wilayah lain yang memiliki keunggulan sumber daya alam. Menggunakan data tentang pendidikan pemimpin nasional dalam basis data lintas negara dan transisi acak, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemimpin yang berpendidikan cenderung meningkatkan pertumbuhan ekonomi, investasi asing dan pencapaian pendidikan warga negara (Besley dkk., 2011; Diaz-Serrano dan Pérez-Reynosa, 2013; Congleton dan Zhang, 2013). Besley, Pande, dan Rao (2005) menemukan bahwa tingkat pendidikan kepala desa di India berkorelasi dengan korupsi yang lebih rendah.

Martinez-Bravo, M. (2017) meneliti efek dari program pembangunan di Indonesia tentang pemerintahan daerah dan penyediaan barang publik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini menyebabkan peningkatan penting pada penyediaan barang publik dan memberikan bahwa peningkatan dalam pendidikan kepala desa adalah salah satu mekanisme utama di balik hasil ini. Carnes dan Lupu (2016) menyelidiki dampak pendidikan para pemimpin politik di tingkat nasional, negara bagian dan tingkat lokal dalam konteks yang berbeda. Mereka yang mempelajari efek variasi kelembagaan pada kualitas pemimpin lokal. Penelitian efek jenis kelamin pernah dilakukan (Chattopadhyay dan Duflo 2004; Clots-Figueras 2011, 2012) yaitu tentang efek jenis kelamin politisi terhadap hasil kebijakan. Penelitian tentang efek usia pernah dilakukan Alesina, Troiano, dan Cassidy (2015) tentang umur politisi dan menunjukkan hasil bahwa politisi muda lebih mungkin meningkatkan investasi dan menarik lebih banyak transfer sebelum pemilihan. Penelitian tersebut juga pernah dilakukan oleh Akhmedov dan Zhuravskaya (2004), Drazen dan Eslava (2003), Shi dan Svensson (2006).

3. METODE PENELITIAN

Data yang di gunakan pada penelitian ini menggunakan data mikro dari Pendataan Potensi Desa (Podes) 2018. Pendataan ini dilakukan Badan Pusat Statistik dan merupakan data tematik berbasis wilayah di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten/kota di Indonesia. Data yang digunakan yaitu karakteristik perangkat desa yang meliputi jenis kelamin, umur dan pendidikan terakhir yang ditamatkan dan Indeks Pembangunan Desa Tahun 2018 di Indonesia. Jumlah penelitian pada data Podes tahun 2018 sebanyak 75.436 observasi setingkat desa di Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan menggunakan *software* ArcView GIS 3.3 untuk memberikan gambaran secara visual tentang Indeks Pembangunan Desa. Penelitian ini juga menggunakan Regresi linier berganda dengan variabel *Dummy* dengan variabel terikat yaitu Indeks Pembangunan Desa (IPD) dan variabel bebasnya karakteristik perangkat desa menggunakan STATA 13.

Tabel 1. Variabel Penelitian dan Definisinya

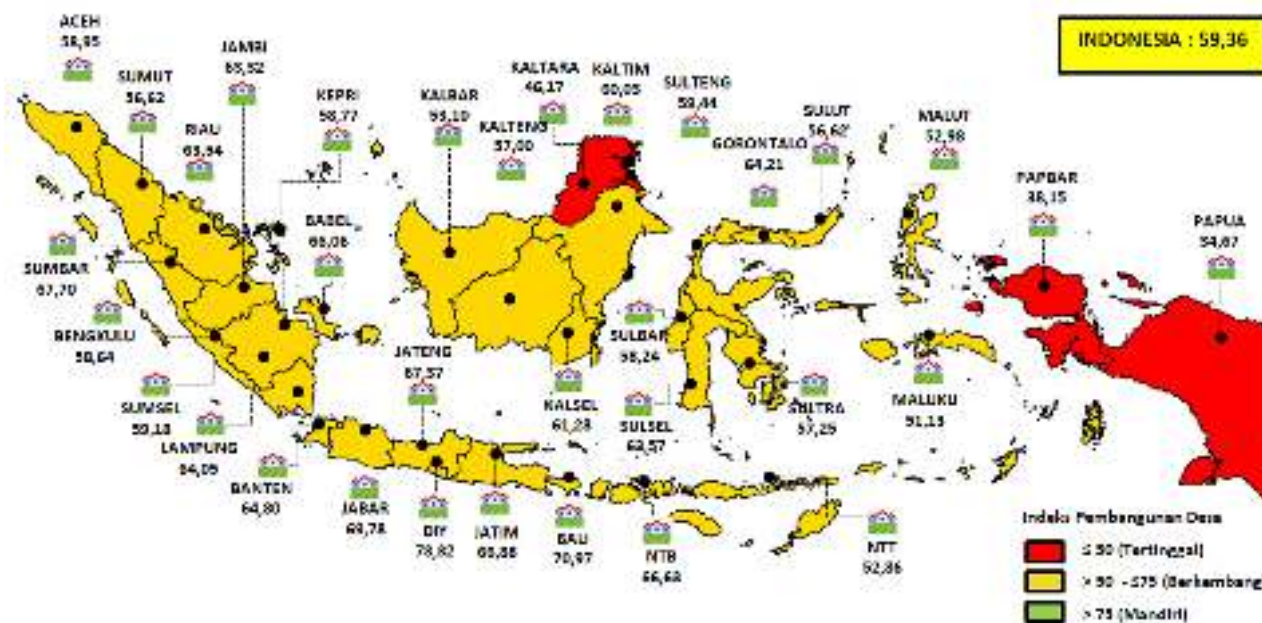
Variabel	Keterangan	Definisi
Y	Indeks Pembangunan Desa	Indeks komposit yang menunjukkan tingkat kemajuan atau perkembangan desa pada suatu waktu.
X ₁	Jenis Kelamin Kepala Desa (0 = Perempuan, 1 = Laki-laki)	Variabel ini diperoleh dari pertanyaan pada kuesioner Podes 2018-Desa blok XVII rincian 1701aK4
X ₂	Jenis Kelamin Sekretaris Desa (0 = Perempuan, 1 = Laki-laki)	Variabel ini diperoleh dari pertanyaan pada kuesioner Podes 2018-Desa blok XVII rincian 1701bK4
X ₃	Pendidikan Terakhir Kepala Desa (0 = Tamat SMP Kebawah, 1 = Tamat SMU/Sederajat, 2 = Tamat Perguruan tinggi)	Pendidikan tertinggi kepala desa yang ditamatkan yaitu pendidikan yang telah diselesaikan pada tingkat terakhir sehingga mendapat tanda tamat belajar atau ijazah. Variabel ini di dapatkan dari pertanyaan pada kuesioner Podes 2018-Desa blok XVII rincian 1701aK5
X ₄	Pendidikan Terakhir Sekretaris Desa (0 = Tamat SMP Kebawah, 1 = Tamat SMU/Sederajat, 2 = Tamat Perguruan tinggi)	Pendidikan tertinggi sekretaris desa yang ditamatkan yaitu pendidikan yang telah diselesaikan pada tingkat terakhir sehingga mendapat tanda tamat belajar atau ijazah. Variabel ini di dapatkan dari pertanyaan pada kuesioner Podes 2018-Desa blok XVII rincian 1701bK5
X ₅	Umur Kepala Desa (Tahun)	Umur kepala desa dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Penghitungan tahun didasarkan pada kalender Masehi. Variabel ini di dapatkan dari pertanyaan pada kuesioner Podes 2018-Desa blok XVII rincian 1701aK3
X ₆	Umur Sekretaris Desa (Tahun)	Umur sekretaris desa dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun terakhir. Penghitungan tahun didasarkan pada kalender Masehi. Variabel ini di dapatkan dari pertanyaan pada kuesioner Podes 2018-Desa blok XVII rincian 1701bK3

4. TEMUANDAN PEMBAHASAN

4.1. Indeks Pembangunan Desa di Indonesia

Indeks Pembangunan Desa (IPD) digunakan untuk mengetahui perkembangan pembangunan desa di Indonesia. Perkembangan desa di Indonesia ada tiga kategori yaitu desa tertinggal, berkembang dan mandiri. Tingkat perkembangan desa tiap Provinsi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 1. Perkembangan desa di Indonesia secara nasional dengan nilai IPD sebesar

59,36 masuk kategori desa berkembang. IPD 2018 di Indonesia dilihat dari hasil rata-rata indeks per provinsi, menunjukkan bahwa di Pulau Sumatera, Provinsi Sumatera Barat, Riau, Jambi Kepulauan Bangka Belitung dan Lampung diatas rata-rata IPD nasional. Pulau Jawa dan Bali semua Provinsi nilai IPD di atas rata-rata IPD nasional. Pulau Nusa Tenggara dan Pulau Sulawesi, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Provinsi Sulawesi Selatan, Gorontalo dan Sulawesi Tengah yang nilai IPD nya di atas rata-rata IPD nasional. Sementara Pulau Kalimantan, Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan IPD nya diatas rata-rata nasional. Pulau Maluku dan Papua, semua Provinsi di pulau tersebut di bawah rata-rata IPD Nasional. Secara umum Provinsi di Indonesia masuk kategori desa berkembang, hanya beberapa saja Provinsi yang masuk kategori desa tertinggal yaitu Provinsi Kalimantan Utara, Papua Barat dan Papua. Provinsi Papua menjadi memiliki nilai IPD terendah di Indonesia artinya masih banyak kondisi desa tertinggal di tahun 2018.



Sumber : Podes 2018, BPS (diolah)

Gambar 1. Indeks Pembangunan Desa 2018 Per Provinsi

4.2. Karakteristik Perangkat Desa

Karakteristik perangkat desa dalam hal ini adalah kepala desa dan sekretaris desa meliputi keberadaan kepala desa dan sekretaris desa, jenis kelamin, umur dan jenjang pendidikan kepala desa dan sekretaris desa.

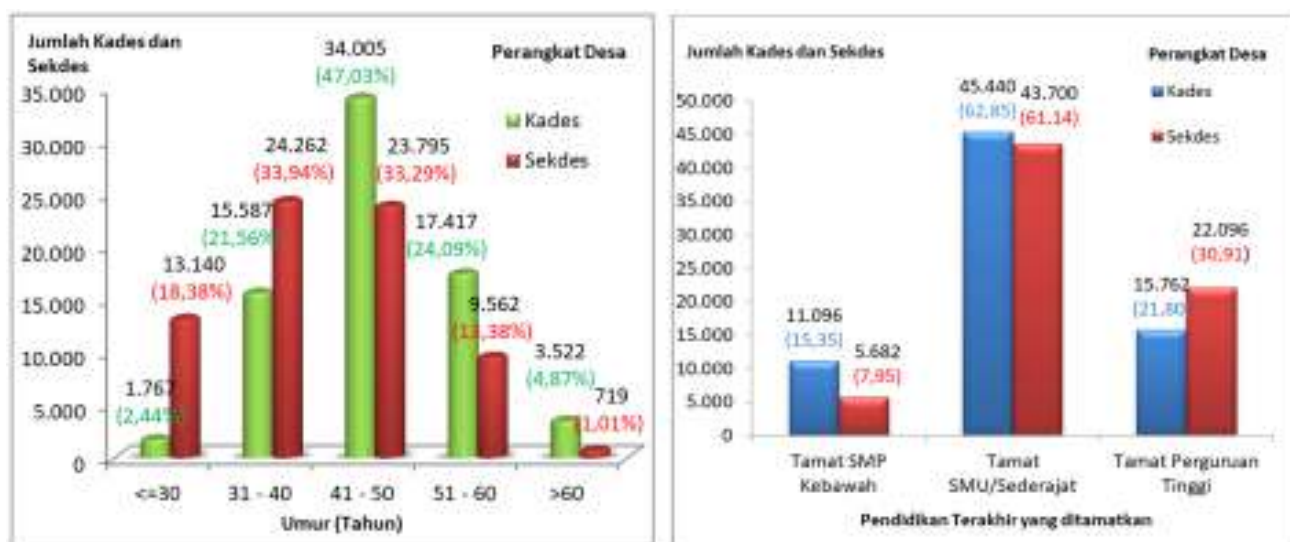


Sumber : Podes 2018, BPS (diolah)

Gambar 2. Keberadaan dan Jenis Kelamin Perangkat Desa

Keberadaan kepala desa pada saat pendataan sebesar 95,84 persen, sedangkan sekretaris desa sebesar 94,75 persen. Ketidak beradaan kepala desa dan sekretaris desa saat pendataan disebabkan karena perangkat desa tersebut meninggal dunia, pengunduran diri atas permintaan sendiri, berakhir masa jabatannya, melanggar larangan sebagai kepala desa atau tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan.

Karakteristik kepala desa berdasarkan jenis kelamin dapat diketahui bahwa pada tahun 2018 jumlah kepala desa dengan jenis kelamin laki-laki sebanyak 68.781 orang atau 95,14 persen, sedangkan jumlah kepala desa dengan jenis kelamin perempuan sebesar 3.517 orang atau 4,86 persen. Sedangkan sekretaris desa yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 63.577 orang atau 88,95 persen dan berjenis kelamin perempuan sebanyak 7.901 orang atau 11,05 persen.



Sumber : Podes 2018, BPS (diolah)

Gambar 3. Umur dan Pendidikan Terakhir Perangkat Desa

Karakteristik kepala desa berdasarkan umur, paling banyak berumur antara 41 sampai 50 tahun dan paling sedikit berumur kurang dari 30 tahun. Sedangkan sekretaris desa, paling banyak berumur 31-40 tahun dan paling sedikit berumur lebih dari 60 tahun. Secara umum umur kepala

desa cenderung banyak yang berumur lebih tua, sedangkan sekretaris desa banyak yang berumur lebih muda.

Karakteristik jenjang pendidikan terakhir kepala desa paling banyak berpendidikan SMU/Sederajat. Jumlah kepala desa menurut jenjang pendidikan SMU/Sederajat yaitu sebanyak 45.440 orang atau sebesar 62,85 persen. Jenjang pendidikan terakhir sekretaris desa paling banyak berpendidikan tamat SMU/Sederajat yaitu sebanyak 43.700 orang atau 61,14 persen. Pendidikan terakhir yang ditamatkan sekretaris desa pada jenjang tamat perguruan tinggi lebih banyak dibandingkan kepala desa.

4.3. *Kaitan Karakteristik Perangkat Desa dan Indeks Pembangunan Desa*

Keterkaitan antara karakteristik perangkat desa yang meliputi jenis kelamin, pendidikan terakhir, umur dengan Indeks Pembangunan Desa digunakan regresi liner berganda dengan variabel *dummy*.

Pengujian dan signifikansi Parameter

Hasil regresi liner berganda dengan variabel *dummy* secara lengkap seperti yang ditunjukkan pada Tabel 2. Berdasarkan Tabel 2 ditunjukkan bahwa hasil pengujian semua variabel yang berpengaruh secara signifikan karena memiliki nilai $p\text{-value} < \alpha$ (0,05). Dari model persamaan yang terbentuk dihasilkan nilai *R-Square* sebesar 0,3266. Hal tersebut menunjukkan bahwa variabel IPD yang dipengaruhi oleh persentase jenis kelamin, pendidikan terakhir yang di tamatkan, umur kades dan sekdes sebesar 32,66 % sedangkan sisanya 67,34 % dijelaskan oleh variabel lain diluar model.

Tabel 2. Pengujian dan signifikansi Parameter Regresi Variabel *Dummy*

Variabel	Coef	Std. Error	t	P-value
Konstanta	22,757	0,382	59,540	0,000 *
Jenis Kelamin Kades (Laki-laki =1)	-1,522	0,195	-7,820	0,000 *
Jenis Kelamin Sekdes (Laki-laki=1)	-2,566	0,135	-19,060	0,000 *
Pendidikan Kades (Tamat SMU=1)	9,915	0,126	78,410	0,000 *
Pendidikan Kades (Tamat PT=1)	13,211	0,148	89,400	0,000 *
Pendidikan Sekdes (Tamat SMU=1)	12,817	0,167	76,620	0,000 *
Pendidikan Sekdes (Tamat PT=1)	17,421	0,181	96,300	0,000 *
Umur Kades	0,248	0,005	48,420	0,000 *
Umur Sekdes	0,166	0,005	35,280	0,000 *
R-squared = 0,3266		* signifikan $\alpha = 5\%$,		
Prob > F = 0,000		Root MSE =10,794		

Pengujian Asumsi

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menghasilkan hasil estimasi parameter model yang memenuhi kriteria BLUE pada residual model. Pengujian asumsi klasik tersebut meliputi pengujian normalitas dan heterogenitas pada residual model dan pengujian multikolinearitas diantara variabel independen model.

Tabel 3. Pengujian Asumsi Normalitas dan Heteroskedastisitas

Pengujian Normalitas		Pengujian Heteroskedastisitas	
Nilai Prob>z		Nilai Prob>Z	
<i>Shapiro Wilk</i>	<i>Shapiro Francia</i>	Chi2(1)	Prob>chi2
0,0000	0,0000	2846,29	0,0000

Pengujian normalitas residual model menggunakan Uji *Shapiro Wilk* dan *Shapiro Francia*. Hasil pengujian pada Tabel 3 dengan menggunakan α sebesar 5% diperoleh hasil bahwa pengujian baik menggunakan uji *Shapiro Wilk* dan *Shapiro Fransia* nilai $p_value < 5\%$ yang berarti residual model tidak berdistribusi normal. Pengujian heterogenitas residual model menggunakan uji *Breusch-Pagan*. Hasil pengujian dengan *Breusch-Pagan* pada Tabel 3 menunjukkan bahwa nilai $p_value < \alpha$ sebesar 5%. Hal ini menunjukkan adanya gejala heterokedastisitas pada residual model.

Tabel 4. Uji Multikolinieritas

Variabel	VIF
Jenis Kelamin Kades (Laki-laki =1)	1,01
Jenis Kelamin Sekdes (Laki-laki=1)	1,05
Pendidikan Kades (Tamat SMU=1)	2,20
Pendidikan Kades (Tamat PT=1)	2,18
Pendidikan Sekdes (Tamat SMU=1)	3,92
Pendidikan Sekdes (Tamat PT=1)	4,12
Umur Kades	1,05
Umur Sekdes	1,13

Pengujian multikolinieritas dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi korelasi atau tidak antar variabel bebas. Uji ini dapat dilakukan dengan melihat nilai VIF dari masing – masing variabel bebas. Apabila nilai VIF lebih kecil daripada 10 maka dapat disimpulkan tidak terjadi multikolinieritas (Gujarati, 2012). Berdasarkan Tabel 4 menunjukkan bahwa nilai VIF dari masing – masing variabel bebas < 10 , maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat multikolinieritas antara variabel bebasnya. Pengujian asumsi klasik di atas menunjukkan bahwa model tersebut terjadi pelanggaran asumsi klasik yaitu ketidaknormalan dan heterokedastisitas pada residual model tersebut. Hanya uji multikolinieritas saja yang memenuhi asumsi klasik. Untuk mengatasi adanya pelanggaran asumsi tersebut digunakan metode *Robustness Standar Error* yang akan dijelaskan pada bab berikutnya.

Hasil Estimasi

Hasil regresi linier berganda dengan variabel *dummy* secara lengkap menggunakan *Robust Standar Error* seperti yang ditunjukkan pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Pengujian dan signifikansi Parameter Regresi Variabel *Dummy*

dengan *Robust Standar Error*

Variabel	Coef	<i>Robust Std. Error</i>	t	P-value	
Konstanta	22,757	0,408	59,540	0,000	*
Jenis Kelamin Kades (Laki-laki =1)	-1,522	0,179	-8,490	0,000	*
Jenis Kelamin Sekdes (Laki-laki=1)	-2,566	0,120	-21,400	0,000	*
Pendidikan Kades (Tamat SMU=1)	9,915	0,159	62,140	0,000	*
Pendidikan Kades (Tamat PT=1)	13,211	0,174	75,880	0,000	*
Pendidikan Sekdes (Tamat SMU=1)	12,817	0,209	61,310	0,000	*
Pendidikan Sekdes (Tamat PT=1)	17,421	0,217	80,350	0,000	*
Umur Kades	0,248	0,005	45,280	0,000	*
Umur Sekdes	0,166	0,004	34,280	0,000	*
R-squared = 0,3266	* signifikan $\alpha = 5\%$,				
Prob > F = 0,000	Root MSE =10,794				

Setelah dilakukan regresi linier dengan variabel *dummymenggunakan Robust Standar Error*, maka didapatkan variabel jenis kelamin, pendidikan, umur kepala desa dan sekretaris desa berpengaruh secara signifikan terhadap IPD. Dari Hasil pengujian pada Tabel 5, didapatkan analisa sebagai berikut :

Kepala desa berjenis kelamin perempuan memiliki Indeks Pembangunan Desa (IPD) 1,522 lebih tinggi dibandingkan kepala desa berjenis kelamin laki-laki sedangkan sekretaris desa berjenis kelamin perempuan memiliki IPD 2,566 lebih tinggi dibandingkan sekretaris desa berjenis kelamin perempuan dengan asumsi variabel yang lain tetap. Jika Umur Kades bertambah satu tahun, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka akan menaikkan nilai IPD sebesar 0,248, sedangkan umur sekdes jika bertambah satu tahun, dengan asumsi variabel lainnya tetap maka akan menaikkan nilai IPD sebesar 0,166.

Kepala desa yang memiliki pendidikan terakhir SMU/Sederajat, desa yang dipimpinnya memiliki IPD 9,915 lebih tinggi dibandingkan desa yang dipimpin Kades berpendidikan tamat SMP ke bawah. Kepala desa yang memiliki pendidikan terakhir tamat perguruan tinggi, desa yang dipimpinnya memiliki IPD 13,211 lebih tinggi dibandingkan desa yang dipimpin Kades berpendidikan tamat SMP ke bawah dengan asumsi variabel yang lain tetap. Sekretaris desa yang memiliki pendidikan terakhir SMU/Sederajat, memiliki IPD 12,817 lebih tinggi dibandingkan sekretaris desa berpendidikan tamat SMP ke bawah. Sekretaris desa yang memiliki pendidikan terakhir tamat perguruan tinggi, memiliki IPD 17,421 lebih tinggi dibandingkan sekretaris desa berpendidikan tamat SMP ke bawah dengan asumsi variabel. Artinya bahwa perangkat desa yang lebih berpendidikan cenderung meningkatkan IPD. Hal ini sejalan dengan penelitian (Besley dkk., 2011; Congleton dan Zhang, 2013; Diaz-Serrano dan Pérez-Reynosa, 2013; Odoardi dan Muratore, 2019).

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Perkembangan desa di Indonesia secara nasional dengan nilai IPD sebesar 59,36 masuk kategori desa berkembang. Provinsi Papua menjadi memiliki nilai IPD terendah di Indonesia artinya masih banyak kondisi desa tertinggal di tahun 2018. Secara umum perangkat desa berjenis kelamin perempuan, desa yang dipimpinnya memiliki IPD lebih tinggi dibandingkan desa yang dipimpin perangkat desa berjenis kelamin laki-laki. Fokus penelitian ini adalah tingkat

pendidikan yang ditamatkan perangkat desa. Penelitian ini menemukan bukti bahwa perangkat desa yang lebih berpendidikan cenderung akan meningkatkan IPD.

Untuk penelitian selanjutnya dapat digunakan metode estimasi parameter atau metode statistik lainnya untuk menghasilkan estimasi koefisien model yang lebih efisien. Selain itu ditambahkan variabel ekonomi lainnya yang berhubungan dengan Indeks Pembangunan Desa, seperti infrastruktur, anggaran atau inovasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Akhmedov, A., & Zhuravskaya, E. (2004). Opportunistic political cycles: test in a young democracy setting. *The quarterly journal of economics*, 119(4), 1301-1338.
- Alesina, A. F., Troiano, U., & Cassidy, T. (2015). *Old and young politicians* (No. w20977). National Bureau of Economic Research.
- Badan Pusat Statistik .(2018). Buku Panduan Petugas Lapangan Podes, *Jakarta: BPS*.
- Badan Pusat Statistik.(2019). Indeks Pembangunan Desa 2018, *Jakarta: BPS*.
- Besley, T. J., Pande, R., & Rao, V. (2005). Political selection and the quality of government: Evidence from South India. *Yale University Economic Growth Center Discussion Paper No.921*.
- Besley, T., Montalvo, J. G., & ReynalQuerol, M. (2011). Do educated leaders matter?. *The Economic Journal*, 121(554), F205-227.
- Carnes, N., & Lupu, N. (2016). What good is a college degree? Education and leader quality reconsidered. *The Journal of Politics*, 78(1), 35-49.
- Chattopadhyay, R., & Duflo, E. (2004). Women as policy makers: Evidence from a randomized policy experiment in India. *Econometrica*, 72(5), 1409-1443.
- Congleton, R. D., & Zhang, Y. (2013). Is it all about competence? The human capital of US presidents and economic performance. *Constitutional Political Economy*, 24(2), 108-124.
- Clots-Figueras, I. (2011). Women in politics: Evidence from the Indian States. *Journal of public Economics*, 95(7-8), 664-690.
- Clots-Figueras, I. (2012). Are female leaders good for education? Evidence from India. *American Economic Journal: Applied Economics*, 4(1), 212-44.
- Diaz-Serrano, L., & Pérez, J. (2013). Do More Educated Leaders Raise Citizens' Education?. Discussion Paper 7661, Institute for the Study of Labor (IZA)
- Drazen, A., & Eslava, M. (2003). *The Political Budget Cycle in Columbia*. working paper, University of Maryland.
- Goel, R. K., Mazhar, U., Nelson, M. A., & Ram, R. (2017). Different forms of decentralization and their impact on government performance: Micro-level evidence from 113 countries. *Economic Modelling*, 62, 171-183.
- Goel, R. K., & Saunoris, J. W. (2017). Forms of government decentralization and institutional quality: evidence from a large sample of nations. In *Central and Local Government Relations in Asia*. Edward Elgar Publishing.

Gujarati, D. N., & Porter, D., C. (2012). *Basic econometrics*. New York: Tata McGraw-Hill Education.

Martinez-Bravo, M. (2017). The local political economy effects of school construction in Indonesia. *American Economic Journal: Applied Economics*, 9(2), 256-89.

Odoardi, I., & Muratore, F. (2019). The role of human capital after the crisis in Italy: A regional analysis. *Socio-Economic Planning Sciences*, 66, 58-67.

Shi, M., & Svensson, J. (2006). Political budget cycles: Do they differ across countries and why?. *Journal of public economics*, 90(8-9), 1367-1389.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 *tentang Desa*. Jakarta

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah* . Jakarta